Journal of Aafiyah Health Research (JAHR) 2025. Vol. 6, No. 1. Page 257-271
https://doi.org/10.52103/jahr.v6i1.1967
P-ISSN: 2722-4929, E-ISSN: 2722-4945

JOURNAL OF AAFIYAH HEALTH RESEARCH (JAHR)

Publisher: *Postgraduate Program, Universitas Muslim Indonesia*
Journal Homepage:
http://pascaumi.ac.id/index.php/jahr/index

Original Article

Implementasi Pemeriksaan Kesehatan Siswa Pendidikan Bintara Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016 di SPN Polda Sulawesi Selatan Tahun 2024

Frezzy Sanatha Samuel, *Reza Aril Ahri, Wardiah Hamzah

Program Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Article History
Received: 25 December 2024
Revised: 04 January 2025
Accepted: 12 January 2025

Keywords: Rikkes; SPN Polda; Perkap No 7 Tahun 2016

Corresponding Author:
E-mail:
rezaaril.ahri@umi.ac.id
Address: Jalan. Urip Sumoharjo, No. 5, 90231, Makassar, South Sulawesi, Indonesia

ABSTRAK

Latar belakang: Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan penerimaan bagi calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016. Saat ini pelaksanaan pemeriksaan kesehatan siswa pendidikan Bintara di SPN Polda Sulsel masih terdapat kendala.
Tujuan: Untuk menganalisis Implementasi Pemeriksaan Kesehatan Siswa Pendidikan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016 di SPN Polda Sulawesi Selatan Tahun 2024 dari segi Input, Proses, dan Output.
Metode: Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik snowballing Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara mendalam dengan alat perekam, telusur dokumen dan observasi. Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan bulan September-November 2024.
Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan kesehatan siswa pendidikan Bintara meskipun dilaksanakan belum sepenuhnya mengacu pada Perkap Nomor 7 tahun 2016 karena ada faktor intern institusi yang menghambatnya, tetapi pemegang kebijakan tertinggi di SPN Polda Sulsel dalam hal ini Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulsel tetap membuat kebijakan khusus yang dapat mempengaruhi status kesehatan siswa sehingga kualitas pendidikan tetap terjaga.
Kesimpulan: Implementasi pemeriksaan kesehatan siswa pendidikan Bintara di SPN Polda Sulsel masih harus diperhatikan aspeknya secara keseluruhan mulai dari input, proses, dan output, sehingga pencapaian kualitas pendidikan dapat ditingkatkan, dan masalah-masalah yang dapat menurunkan status kesehatan siswa dapat diatasi secara keseluruhan.

ABSTRACT

Background: The implementation of health checkups for candidates applying to join the Indonesian National Police is regulated by the Chief of the Indonesian National Police Regulation Number 7 of 2016. Currently, there are still challenges in the implementation of health checks for police cadet students at the South Sulawesi Provincial Police School (SPN Polda Sulsel).
Objective: To analyze the implementation of health checks for police cadet students based on Police Chief Regulation No. 7 of 2016 at SPN Polda Sulawesi Selatan in 2024, from the perspective of Input, Process, and Output.
Method: This type of research is a descriptive qualitative method. The informants in this study were selected using snowball sampling technique. Data collection techniques include in-depth interviews with recording tools, document tracing, and observation. The data analysis technique used is the Miles and Huberman model, which consists of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research was conducted from September to November 2024.
Result: The results of this study indicate that although the health checkups for police cadet students are being conducted, they do not fully comply with Police Chief Regulation No. 7 of 2016 due to internal institutional factors that hinder the process. However, the highest policy-making authority at SPN Polda Sulsel, in this case the Head of the Police School, has still implemented special policies that can influence the students' health status, ensuring that the quality of education is maintained.
Conclusion: The implementation of health checkups for police cadet students at SPN Polda Sulsel still requires attention to all aspects, including input, process, and output, so that the quality of education can be improved, and issues that may negatively affect students' health status can be fully addressed.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

P-ISSN: 2722-4929, E-ISSN: 2722-4945

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah keadaan sehat, yang meliputi aspek kesehatan baik secara fisik, mental, sosial maupun spiritual untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomi (UU RI Nomor 36, 2009). Kesehatan fisik yaitu kesehatan yang ditandai dengan kondisi tubuh bugar dan berfungsi secara normal sehingga mampu melakukan aktivitas sehari-hari dan Kesehatan mental terkait dengan pikiran, emosional dan spiritual. Kesejahteraan sosial ditandai dengan keadaan dimana seseorang mampu untuk membentuk hubungan intrapersonal dengan orang lain. Oleh karena itu perlu dilakukan pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan, dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. (Kemenkes, 2019). Upaya mencapai kesehatan dilakukan oleh individu untuk mendapatkan kesehatan, baik itu kesehatan individu maupun keluarga atau kelompok. Kesehatan Individu menurut Kals dan Cobb (1966) dalam (Hicks, 2015) ada 3 jenis yaitu health behavior, ilnes behavior, stick role behavior.

Berbagai upaya untuk menjaga kesehatan individu tidak terlepas dari upaya untuk mencapai kesehatan keluarga dan kelompok serta peranan keluarga atau kelompok dalam merawat dan menjaga kesehatan antara satu dengan yang lainnya merupakan bagian upaya menjaga kesehatan (Hicks, 2015). Salah satu kelompok yang rentan terhadap masalah kesehatan yaitu pada kelompok atau lembaga pendidikan yang menitikberatkan pada pembinaan fisik dan mental. Pelaksanaan pendidikan di lembaga-lambaga tersebut sangat membutuhkan pengawasan dan pengasuhan yang ketat dalam menjaga kesehatan serta kebugaran dari peserta didiknya (Nugraheni Hermien, 2018).

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat Lemdiklat Polri adalah lembaga pendidikan dan akademik dibawah kendali Kapolri. Tugas pokok Lemdiklat Polri adalah merencanakan, mengembangkan, dan menyelanggarakan pendidikan kepolisian dalam rangka menciptakan insan Tri Brata yang Profesional, modern dan terpercaya (Promoter) berdasarkan jenis pendidikan Polri yang meliputi pendidikan profesi, manajerial (kepemimpinan), akademis, dan vokasi serta mengelola komponen pendidikan di lingkungan Polri (Lemdiklat Polri, 2022). Peserta didik yang yang akan melasanakan pendidikan diharuskan sehat secara fisik dan mental. Hal tersebut ditentukan dari proses seleksi atau penerimaan calon peserta didik Polri yang di atur dalam Perkap Nomor 7 Tahun 2016.

Perkap Nomor 7 Tahun 2016 adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan bagi Calon Anggota Polri. Untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memiliki kesehatan dan kesamaptaan yang prima guna mendukung pelaksanaan tugas, oleh karena itu pada seleksi penerimaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan pemeriksaan kesehatan secara bersih, transparan, akuntabel dan humanis. Pada saat peserta pendidikan pembentukan (siswa) Polisi menjalani proses pendidikan, mereka dihadapkan pada situasi yang baru dimana siswa diharuskan mengikuti program-program latihan fisik yang telah ditentukan oleh Lemdik. Selama proses pendidikan ini tak jarang siswa mengalami kegagalan dalam penyesuain fisik dengan program-program latihan yang ada. Sehingga setiap tahun masih saja dilaporkan adanya siswa yang meninggal atau dikeluarkan dari pendidikan karena sakit. (Profil Lemdiklat Polri, 2022).

Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan atau di singkat dengan SPN Polda Sulsel, merupakan salah satu sekolah polisi dibawah naungan Lemdiklat Polri. SPN Polda Sulsel setiap tahunnya melaksanakan pendidikan pembentukan Bintara Polri untuk menghasilkan anggota Polri yang sehat baik dari segi fisik maupun mental. Sehingga nantinya bisa bertugas maksimal dilapangan melindungi mengayomi dan melayani masyarakat (Profil SPN Polda Sulsel, 2020). Menurut profil SPN Polda Sulsel data yang diperoleh dari klinik Soebarkah selaku penyelenggara pelayanan kesehatan di SPN Polda Sulsel yaitu data kunjungan berobat siswa lima tahun terakhir mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 jumlah siswa yang datang berobat ke klinik yaitu sebanyak 3788 siswa. 10 penyakit terbanyak yang ditemukan peneliti: Ispa 25% atau 947 siswa, Paronikia 16% atau 606 siswa, Gastritis 12.3% atau 466 siswa, Joint pain 9% atau 341 siswa, Abces 8% atau 303 siswa, Dermatitis 8% atau 303 siswa, Nyeri otot 7% atau 265 siswa, Demam 6,9% atau 261 siswa, Malaise 5,7% atau 216 siswa dan Varicella 2,1% atau 80 orang (Profil SPN Polda Sulsel, 2024). Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa banyak siswa yang mengalami sakit selama pendidikan dan hal tersebut sangat memepengaruhi kualitas pendidikan di SPN Polda Sulsel.

Berdasarkan hasil observasi awal di SPN Polda Sulsel peneliti menemukan ada siswa yang sedang melaksanakan pendidikan menderita penyakit kronis menahun yaitu TBC, Haemorrhoid dan Varicocele yang seharusnya penyakit ini dapat dideteksi pada saat seleksi atau penerimaan. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa banyak siswa yang mengalami sakit selama pendidikan dan adanya penyakit menahun yang seharusnya terdeteksi dini pada saat proses seleksi. Karena hal tersebut sangat memepengaruhi kualitas pendidikan di SPN Polda Sulsel. Mengingat permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Pemeriksaan Kesehatan Siswa Pendidikan Bintara berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2016 di SPN Polda Sulsel Tahun 2024.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah polisi Negara (SPN) Polda Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September hingga November 2024. Penentuan informan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik snowball sampling. Subjek dalam penelitian ini didapatkan 5 informan, terdiri dari Informan kunci, informan utama dan informan pendukung. Data ini diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam (indepth interview) yang dilakukan terhadap informan. Data sekunder bersumber dari data-data, buku-buku referensi, arsip maupun dokumentasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan kesehatan siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri. Aktifitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL

INPUT

Man (SDM)

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis tentang Man (Sumber daya manusia) dan kompetensinya yang memiliki hubungan dengan implementasi Pemeriksaan Kesehatan Siswa Pendidikan Bintara berdasarkan Peraturan kapolri Nomor 7 tahun 2016 di SPN Polda Sulsel yaitu dengan wawancara mendalam dan telusur dokumen. Dalam Wawancara mendalam terdapat empat pertanyan yang diberikan kepada 1 Informan kunci (Tn. J), 4 Informan Utama (Tn.I, Tn.M, Tn. W dan Tn. K) dan 2 informan pendukung. Berikut pertanyaan dan kutipan wawancara mendalam dari informan yang ditanya:

Apakah di SPN Polda Sulsel memiliki Tim pemeriksaan kesehatan siswa pendidikan Bintara Polri yang sesuai standar untuk masing-masing posisinya?

"Di SPN Polda Sulsel memiliki Tim Rikkes (pemeriksaan kesehatan) yang ditetapkan di dalam Surat Perintah" (Tn. J, 55 Tahun Informan kunci)

Setelah mendapat jawaban secara garis besar dari informan Kunci yang menyatakan bahwa ada Tim Rikkes (pemeriksaan kesehatan) di SPN Polda Sulsel dan ditetapkan dalam surat perintah.

" Tim Rikkes di SPN Polda Sulsel, sudah sesuai standar, hanya tenaga kesehatan yang ada di SPN masih kurang sehingga jika jumlah siswa meningkat maka tenaga kesehatan butuh kerja keras untuk mengcover semua siswa. Terutama penambahan tenaga dokter dan perawat."(Tn. I, 38 Tahun, Informan Utama)

Tenaga kesehatan dan pengasuh siswa di SPN Polda Sulsel mengkonfirmasi bahwa semua petugas kesehatan masuk kedalam Tim Rikkes. Pernyataan ini sejalan dengan informan kunci dan informan utama. Berdasarkan hasil wawancara mendalam keseluruhan informan mengenai SPN Polda Sulsel memiliki Tim pemeriksaan kesehatan siswa pendidikan Bintara Polri yang sesuai standar untuk masing-masing posisinya dapat disimpulkan bahwa Meskipun Tim Rikkes sudah sesuai standar, penambahan tenaga medis seperti dokter dan perawat menjadi sangat penting terutama jika jumlah calon anggota yang diperiksa terlalu banyak, karena untuk saat ini SPN Polda Sulsel masih kekurangan tenaga kesehatan sebanyak 5 orang yang merupakan anggota polri sesuai DSP di SPN Polda Sulsel. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk tetap menjaga kualitas pemeriksaan kesehatan dan memastikan bahwa semua prosedur dilakukan dengan benar dan efisien. Selain itu, dalam Perkap Nomor 7 Tahun 2016 yang mengatur tentang Tim Rikkes sebagai pelaksana pemeriksaan kesehatan, mengharuskan mereka untuk bekerja dengan integritas, menjaga kerahasiaan, serta melaksanakan tugas secara objektif dan profesional, meskipun jumlah peserta pemeriksaan sangat besar.

Apakah ada kompetensi khusus yang harus dipenuhi oleh Tim Rikkes Siswa Bintara di SPN Polda Sulsel?

" Tim Rikkes memiliki latar belakang pendidikan kesehatan, jadi yang kami masukkan ke dalam sprint adalah personil yang memang bertugas di klinik SPN. "(Tn. J, 55 Tahun, Informan Kunci)

Setelah mendapat jawaban secara garis besar dari informan kunci bahwa kompetensi khusus yang harus dipenuhi oleh Tim pemeriksa kesehatan siswa pendidikan Bintara di SPN Polda Sulsel yaitu personil berlatar belakang pendidikan kesehatan yang bertugas di Poliklinik.

"Personil Klinik SPN Polda Sulsel masuk kedalam Tim Rikkes, harus yang berkompeten yang memiliki latar belakang kesehatan. Namun ada juga yang bukan Nakes tapi dimasukkan kelama Tim Rikkes sebagai Administrasi." (Tn. I, 38 Tahun, Informan Utama)

Pernyataan dari Tn. I selaku Kepala Klinik SPN Polda Sulsel sejalan dengan informan kunci bahwa Tim pemeriksa kesehatan siswa pendidikan Bintara memiliki latar belakang kesehatan namun menyatakan pula disamping itu ada tenaga umum diluar kesehatan yang masuk dalam tim sebagai pencatat hasil atau administrasi. Selanjutnya, pertanyaan yang sama diberikan kepada informan pendukung (Ny. D, Tn. H dan Tn. B) untuk mendapatkan informasi yang lebih beragam.

"Semua petugas kesehatan masuk dalam Sprint Tim Rikkes, karena personil kesehatan kurang maka ada personil umum yang ditambahkan."(Ny. D, 39 Tahun)

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

" Tim Rikkes yang saya ketahui adalah semua petugas kesehatan di Klinik SPN Polda Sulsel". (Tn. H, 38 Tahun)
"Yang memeriksa saya waktu Rikkes adalah doker dan perawat". (Tn. B, 20 Tahun)

Pernyataan Ny. D, sejalan dengan pernyataan Informan kunci dan informan utama 1 dan 2 yang menyatakn bahwa semua petugas kesehatan masuk dalam surat perintah Tim pemeriksa kesehatan siswa Bintara, karena personil kesehatan kurang maka ditambahkan personil umum untuk membantu. Selanjutnya pernyataan Tn H dan Tn B selaku informan pendukung sejalan dengan informan kunci dan informan utama bahwa mereka mengetahui Tim pemeriksa kesehatan siswa Bintara adalah petugas kesehatan yaitu dokter dan perawat.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam keseluruhan informan mengenai kompetensi khusus yang harus dipenuhi oleh Tim pemeriksa kesehatan Siswa Bintara di SPN Polda Sulsel dapat disimpulkan bahwa Kompetensi khusus yang masih harus dipenuhi dalam Tim Rikkes mencakup kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan teknis spesifik dalam hal pemeriksaan kesehatan. Kompetensi ini perlu disesuaikan dengan standar medis yang ada sesuai Perkap nomor 7 tahun 2016, agar pemeriksaan kesehatan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akurat.

Money (Dana)

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis tentang pendanaan (biaya) yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) siswa Bintara di SPN Polda Sulsel yaitu dengan metode wawancara mendalam. Dalam wawancara mendalam, terdapat dua pertanyaan yang diberikan kepada informan kunci (Tn. J), dan empat informan utama. (Tn. S, Tn. W, Tn K dan Tn. I). Berikut pertanyaan dan kutipan wawancara mendalam dari informan yang ditanya:

Bagaimana pendanaan (biaya) pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) siswa pendidikan Bintara di SPN Polda Sulsel?

"Ada dana khusus untuk pemeriksaa kesehatan siswa yang sedang pendidikan. Sumbernya dari Dipa SPN Polda Sulsel. Dana akan turun setiap ada siswa yang sedang pendidikan dan banyaknya sesuai dengan jumlah siswa".(Tn. J, 55 Tahun, Informan Kunci)

Setelah mendapat jawaban secara garis besar dari informan kunci, selanjutnya pertanyaan serupa diajukan ke informan utama dalam hal ini Kepala urusan keuangan (Tn. S), Kepala sub bagian perencanaan dan administrasi (Tn. W), Kepala urusan pelayanan umum yang membawahi bagian Sarpras Logistik (Tn. K, 56 Tahun, Informan Utama) serta Kepala Klinik SPN Polda Sulsel selaku pengguna anggaran (Tn. I) untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail dan terperinci.

"Anggaran Khusus untuk kesehatan ada. Sumbernya berasal dari Dipa SPN Polda Sulsel. Dana pemerisaan kesehatan akan turun pada saat siswa sedang pendidikan, besarnya sesuai jumlah siswa. Semua jenis permintaan kebutuhan untuk biaya masuk ke Bidang Logistik dan diteruskan ke urusan keuangan SPN Polda Sulsel". (Tn. S, 49 Tahun, Informan Utama)

"Anggaran Rikkes siswa telah dicantumkan dalam Dipa SPN Polda Sulsel, besarannya sesuai jumlah siswa yang ada." (Tn. W, 55 Tahun, Informan Utama)

"Anggaran Rikkes siswa pendidikan Bintara ada dalam Dipa. Bagian Sarpras logistik akan menerima nota dinas rencana kebutuhan Rikkes dari Kapoliklinik selanjutnya renbut tersebut diteruskan ke bagian keuangan untuk pencairan".(Tn. K, 56 Tahun, Informan Utama)

"Ada dana yang digunakan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan siswa, diambil dari Dipa. Kami membuat rencana kebutuhan Rikkes ke Sarpras logistik kemudian akan diteruskan ke keuangan akan mencairkan dana berdasarkan renbut yang dibuat ".(Tn. I, 38 Tahun, Informan Utama)

Pernyataan seluruh informan utama sejalan dan memperkuat pernyataan informan kunci bahwa ada dana khusus yang terdapat pada Dipa SPN Polda Sulsel. Dana akan turun setiap ada siswa yang sedang pendidikan dan banyaknya sesuai dengan jumlah siswa. Kepala klinik selaku pengguna anggaran akan membuat rencana kebutuhan (Renbut) pemeriksaan kesehatan siswa untuk diserahkan ke bidang Sarpras Logistik, selanjut diteruskan ke bagian Keuangan untuk pencairan dana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam keseluruhan informan mengenai pendanaan (biaya) yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) siswa Bintara di SPN Polda Sulsel dapat disimpulkan bahwa ada dana khusus yang mendukung pendanaan (biaya) untuk pemeriksaan siswa. Hal ini diatur dalam DIPA SPN Polda Sulsel. Pemenuhan kebutuhannya dilakukan oleh urusan keuangan (Kaurkeu). Tim Rikkes akan membuat rencana kebutuhan untuk pelaksanaan rikkes siswa dan diajukan ke bagian logistik dan untuk pencairan dana renbut diserahkan ke keuangan.

Untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan siswa, Tim Rikkes melalui prosedur administratif yang jelas mengajukan pendanaan yang diperlukan kepada bidang logistik dan keuangan. Proses ini mencerminkan adanya pemahaman tentang pentingnya koordinasi yang baik antara berbagai pihak (Tim Rikkes, logistik, dan keuangan) agar kebutuhan pemeriksaan kesehatan dapat dipenuhi sesuai dengan anggaran yang disetujui. Pengelolaan

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

anggaran harus dilakukan dengan prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta dilengkapi dengan administrasi yang tertib sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada negara. Ini memastikan bahwa penggunaan dana untuk pemeriksaan kesehatan siswa dilakukan dengan cara yang sah, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Apakah ada masalah terkait pendanaan untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) siswa Bintara di SPN Polda Sulsel?

"Masalah dalam hal pendanaan belum kami temukan. Karena setiap mulainya pendidikan pasti dana akan turun termasuk dana untuk Rikkes. Mungkin hanya masalah teknis saja yang sering terjadi. (Tn. J, 55 Tahun, Informan Kunci)

Setelah mendapat jawaban secara garis besar dari informan kunci, selanjutnya pertanyaan serupa diajukan ke informan utama dalam hal ini Kepala urusan keuangan (Tn. S), Kepala sub bagian perencanaan dan administrasi (Tn. W), Kepala urusan pelayanan umum yang membawahi bagian Sarpras Logistik (Tn. K, 56 Tahun, Informan Utama) serta Kepala Klinik SPN Polda Sulsel selaku pengguna anggaran (Tn. I) untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail dan terperinci.

"Masalah dalam hal dana atau anggaran untuk Rikkes siswa biasanya hanya keterlambatan pencairan saja, karena Rikkes awal dilaksanakan pada awal masuk pendidikan jadi dana yang digunakan belum diambil dari Dipa karena membutuhkan waktu dalam pencairan anggaran tersebut. Jadi dana yang digunakan dipinjam dari dana operasional SPN Polda Sulsel". (Tn. S, 49 Tahun, Informan Utama)

"Masalah dalam pendanaan Rikkes biasanya hanya teknis saja yaitu waktu pencairan kadang terlambat dari waktu pelaksanaan Rikkes siswa pendidikan Bintara di SPN Polda Sulsel". (Tn. W, 55 Tahun, Informan Utama)

"Masalah nya terkait waktu pencairan dana yang yang terlambat, jadi harus menggunaakan dana operasional SPN Polda Sulsel". (Tn. K, 56 Tahun, Informan Utama)

Pernyataan seluruh informan utama sejalan dan memperkuat pernyataan informan kunci bahwa masalah pendanaan dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan siswa pendidikan Bintara Polri di SPN Polda Sulsel hanya dalam hal tekhnis saja yaitu pencairan dana yang terlambat dari jadwal pelaksanaan Rikkes apalagi pelaksanaan Rikkes awal yang dilaksanakan di awal pendidikan namun dapat diatasi dengan menggunakan dana operasional SPN Polda Sulsel terlebih dahulu. Pernyataan tersebut dilengkapi pula oleh informan 4 selaku penanggung jawab pelaksanaan rikkes yaitu Kepala klinik SPN Polda Sulsel yang menyatakan bahwa dana Rikkes yang tersedia pada Dipa tidak mengkafer pemeriksaan kesehatan menyeluruh sesuai Perkap Nomor 7 Tahun 2016.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam keseluruhan informan mengenai masalah terkait pendanaan untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) siswa Bintara di SPN Polda Sulsel dapat disimpulkan bahwa Masalah terkait pendanaan untuk pelaksanaan Rikkes siswa terkait keterlambatan pencairan, karena Rikkes awal dilaksanakan pada awal masuk pendidikan sehingga dana yang digunakan belum dapat digunakan karena membutuhkan waktu dalam pencairan anggaran tersebut. Sehingga dana yang digunakan dipinjam dari dana operasional SPN Polda Sulsel. Namun dana yang ada hanya untuk pemeriksaan tertentu saja. Tidak meng-cover pemeriksaan kesehatan lengkap sesuai Perkap Nomor 7 Tahun 2016.

Tantangan dalam pengelolaan pendanaan yang terpusat pada keuangan, yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk pemeriksaan kesehatan siswa. Kendati demikian, dalam konteks Perpol Nomor 11 Tahun 2011, terdapat prinsip-prinsip yang harus diikuti, seperti kelangsungan hidup dan pengelolaan yang baik. Proses ini mengharuskan penggunaan anggaran dengan cara yang efektif, tepat guna, transparan, dan akuntabel, serta membutuhkan perencanaan strategis yang matang, identifikasi risiko, dan pengendalian keuangan yang ketat untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan bijak dan kegiatan tetap terlaksana meskipun ada kendala pencairan.

Methode (Kebijakan / Perpol)

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis Methode atau kebijakan atau aturan (Pedoman) yang berhubungan dengan Implementasi implementasi Pemeriksaan Kesehatan Siswa Pendidikan Bintara berdasarkan Peraturan kapolri Nomor 7 tahun 2016 di SPN Polda Sulsel yaitu dengan wawancara mendalam dan telusur dokumen. Dalam wawancara mendalam, terdapat tiga pertanyaan yang diberikan kepada informan kunci (Tn. J), informan utama (Tn. I, Tn, M, Tn, W, Tn. S, Tn. K), dan semua informan pendukung terkait dengan kebijakan. Berikut pertanyaan dan kutipan wawancara mendalam dari informan yang ditanya:

Apakah terdapat kebijakan khusus di SPN Polda Sulsel yang berkaitan dengan perkap nomor 7 Tahun 2016 tentang pelasanaan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) siswa pendidikan Bintara?

" Ada kebijakan khusus terkait Perkap 7 Tahun 2016, salah satunya yaitu Rikkes dilaksanakan 3 kali selama pendidikan Siswa. Jenis Rikkes siswa juga menyesuakan dengan dana kesehatan untuk Siswa yang di tetapkan dalam Dipa/anggaran belanja SPN Polda Sulsel."(Tn. M, 53 Tahun, Informan Utama)

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Setelah mendapat jawaban secara garis besar dari informan Kunci bahwa ada kebijakan khusus terkait Perkap 7 Tahun 2016, yaitu Rikkes dilaksanakan tiga kali selama pendidikan dan kebijakan jenis pemeriksaan kesehatan yang menyesuaikan dana Dipa.

"Terkait pemeriksaan kesehatan siswa banyak kebijakan yang ada di SPN Polda Sulsel dan itu semua telah terlaksana dengan baik" (Tn. M, 53 Tahun, Informan Utama)

"Ada kebijakan terkait Rikkes siswa di SPN ini, dan sudah dituangkan dalam SOP". (Tn. W, 55 Tahun, Informan Utama)

Semua pernyataan informan utama sejalan dan memperkuat pernyataan infroman kunci yaitu menyatakan ada kebijakan khusus terkait Perkap 7 Tahun 2016, yaitu rikkes dilaksanakan tiga kali selama pendidikan dan ditetapkan jenis pemeriksaan hanya pada pengukuran TB, BB, Tensi, Nadi dan fisik hal ini mengikuti jumlah dana yang tersedia pada Dipa untuk Rikkes siswa pendidikan Bintara.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam keseluruhan informan mengenai kebijakan khusus di SPN Polda Sulsel yang berkaitan dengan perkap nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) siswa pendidikan Bintara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebijakan khusus terkait Perkap 7 Tahun 2016 di SPN Polda Sulsel yaitu Rikkes siswa dilaksanakan tiga kali selama pendidikan dan jenis rikkes siswa menyesuakan dengan dana kesehatan untuk Siswa yang di tetapkan dalam DIPA/anggaran belanja SPN Polda Sulsel.

Material (Sarana)

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis tentang material atau sarana dan prasarana sesuai standar yang menunjang pemeriksaan kesehatan siswa pendidikan Bintara yaitu dengan metode wawancara mendalam dan observasi langsung oleh peneliti di Klinik Spn Polda Sulsel. Berikut pertanyaan dan kutipan wawancara mendalam dari informan yang ditanya:

Bagaimana ketersediaan Sarana dan prasarana dalam membantu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) siswa Bintara di SPN Polda Sulsel? Apakah ada Bahan dan alat yang saat ini dimiliki dalam menunjangnya

"Sarana dan prasarana Rikkes sudah tersedia, bahan dan alat sudah tersedia. Namun masih kurang dan belum lengkap serta masih tradisional" (Tn. J, 55 Tahun, Informan Kunci)

Setelah mendapat jawaban secara garis besar dari informan kunci, selanjutnya pertanyaan serupa diajukan ke informan utama dalam hal ini Kepala klinik untuk mendapatkan jawaban yang lebih terinci (Tn.I)

"Sarana dan prasarana yang menunjang pemeriksaan kesehatan siswa sudah tersedia, namun belum lengkap dan masih ada alat kesehatan yang belum modern, jika ada kekurangan akan dibuatkan renbut untuk dilengkapi ke bagian Sarpras Logistik. Namun itu pun bertahap tidak bisa secara langsung semua Sarpras dipenuhi."(Tn. I, 38 Tahun, Informan utama)

Pernyataan Informan utama sejalan dan memperkuat pernyataan informan kunci, bahwa ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ada namun menurut Tn. I selaku Kepala klinik menyatakan alat kesehatan yang ada masih kurang dan belum lengkap serta belum modern. Solusinya dengan membuat rencana kebutuhan yang diajukan ke bagian Sarpras Logistik. Pengadaan bertahap tidak bisa langsung dipenuhi sekaligus. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Tn. K selaku Kepala urusan pelayanan umum yang membawahi bagian Sarana prasana (Sarpras) Logistik dan Tn. S selaku bagian urusan keuangan SPN Polda Sulsel. Kemudian dari hasil observasi yang telah dilakukan diketahui bahwa dukungan sarana dan prasarana pemeriksaan kesehatan sudah tersedia gedung untuk pelaksanaan Rikkes, alat pengukur berat badan, tinngi badan dan alat tensi digital. Dari segi jumlah memang kurang.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam keseluruhan informan mengenai ketersediaan Sarana dan prasarana alat pemeriksaan kesehatan dalam membantu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) siswa Bintara di SPN Polda Sulsel dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana dalam hal ini alat pemeriksaan kesehatan sudah tersedia tapi belum lengkap dan juga dibutuhkan yang lebih modern. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung Rikkes Polri menjadi perhatian penting. Dalam konsep emik, ini mencerminkan bagaimana kelompok internal Polri mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana dengan kerjasama eksternal, sementara dalam konsep etik, hal ini menekankan pentingnya memenuhi standar dan kualitas sarana serta menjaga kepentingan moral serta profesionalisme dalam proses pemeriksaan kesehatan.

Permasalahan apa terkait sarana dan prasarana yang sering terjadi dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut?

"Masalah yang biasa terjadi yaitu jika siswa yang pendidikan banyak, maka sarana dan prasana yang digunakan tidak seimbang dengan jumlah siswa yang pendidikan. Masalah ini diatasi dengan pinjam pakai alkes ke Biddokkes Polda Sulsel. Dan penambahan ruangan yang digunakan untuk Rikkes".(Tn. J. 55 Tahun. Informan Kunci).

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Setelah mendapat jawaban secara garis besar dari informan Kunci bahwa masalah yang terjadi yaitu kecukupan alat kesehatan dengan jumlah siswa yang pendidikan, dan solusi yang diambil jika hal tersebut terjadi yairu dengan meminjam pakai alkes kepada Biddokkes Polda Sulsel.

"Selama ini sarana dan prasarana sudah memadai, namun jika jumlah siswa yang pendidikan banyak maka sarana dan prasarana butuh penambahan. Kami biasanya meminta dukungan penambahan alat kesehatan ke Biddokkes Polda Sulsel".(Tn. I. 38 Tahun. Informan Utama)

Pernyataan informan utama sejalan dan memperkuat informan kunci bahwa masalah yang ada jika jumlah siswa yang dididik meningkat maka membutuhkan penambahan alat kesehatan. Solusi yang diambil yaitu meminta dukungan kepada Biddokkes Polda Sulsel.

PROSES

Perencanaan pemeriksaan kesehatan siswa pendidikan Bintara

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis tentang perencanaan pemeriksaan kesehatan siswa pendidikan Bintara dengan metode wawancara mendalam dan telusur dokumen oleh peneliti di SPN Polda Sulsel. Berikut pertanyaan dan kutipan wawancara mendalam dari informan yang ditanya:

Bagaimana proses perencanaan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan siswa Bintara? Apakah ada masalah yang ditemukan?

"Perencanaan pelaksanaan Rikkes siswa dibuat pada akhir tahun yang tertuang dalam Rengiat SPN Polda Sulsel. Perencanaan ini didasari atas Dipa. Tidak ada masalah yang berarti dalam perencanaan". (Tn. J, 55 Tahun, Informan Kunci)

Proses perencanaan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan siswa pendidikan Bintara dijelaskan secara garis besar oleh informan kunci bahwa perencanaan pelaksanaan Rikkes sudah ada di Rengiat (Rencana kegiatan) SPN Polda Sulsel dan didasari atas Dipa (Anggaran). Sedangkan menurut informan kunci menyatakan bahwa tidak ada masalah yang berarti dalam proses perencanaan ini.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam keseluruhan informan mengenai proses perencanaan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan siswa Bintara dan masalah yang ditemukan dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pemeriksaan kesehatan siswa tercantum dalam rencana kegiatan (Rengiat) SPN Polda Sulsel yaitu sebanyak 3 kali di awal, pertengahan dan akhir pendidikan yang didasari atas DIPA (anggaran) dan masuk dalam kurikulum pendidikan. Tidak ada masalah yang berarti dalam proses perencanaan.

Perencanaan anggaran dianggap sebagai faktor utama yang mendasari setiap kegiatan yang direncanakan di Polri, di mana anggaran harus direncanakan secara matang agar kegiatan dapat berjalan lancar. Penyusunan Rencana Kerja Polri harus berpedoman pada peraturan yang ada, mencerminkan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan anggaran untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi Polri secara profesional dan strategis. Keduanya berperan penting untuk memastikan bahwa anggaran dan perencanaan yang disusun dapat digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan organisasi.

Pengorganisasian pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) siswa pendidikan Bintara di SPN Polda Sulsel

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis tentang pengorganisasian pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) siswa pendidikan Bintara di SPN Polda Sulsel dengan metode wawancara mendalam dan telusur dokumen oleh peneliti di SPN Polda Sulsel. Berikut pertanyaan dan kutipan wawancara mendalam dari informan yang ditanya:

Bagaimana proses pengorganisasian dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan siswa Bintara? Apakah ada masalah yang ditemukan?

" Pemeriksaan kesehatan siswa Bintara Polri memiliki susunan Tim yaitu ketua tim, sekretaris, koordinator tim dan tim pemeriksa. Semua bertugas sesuai job desk nya. Masalah yang ada hanya pada cukup tidaknya tenaga yang akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Susunan Tim sudah sesuai Perkap". (Tn. J, 55 Tahun, Informan kunci)

Informan kunci menjelaskan pengorganisasian yaitu dengan adanya susunan tim pemeriksaan kesehatan siswa pendidikan Bintara. Susunan tim tersebut terdiri dari ketua tim, sekretaris koordinator tim dan tim pelaksana. Susunan tim sudah sesuai Perkap Nomor 7 Tahun 2016 . Masalah yang terjadi yaitu pada tenaga kesehatan yang kurang.

"Pemeriksaan kesehatan memiliki susunan tim diketuai oleh ketua tim yakni Ka SPN, sekretaris tim yaitu Kabinjaskes, Koordinator tim yaitu Kapoliklinik, dan tim pemeriksa terdiri dari dokter, perawat dan tenaga umum admnistrasi. Masalahnya hanya pada ketersediaan tenaga kesehatan. Namun kami memiliki solusi jika kekurangan tenaga kesehatan akan meminta bantuan tambahan Bko dari Biddokkes Polda sulsel".(Tn. I, 38 Tahun, Informan utama)

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Berdasarkan hasil wawancara mendalam keseluruhan informan mengenai proses pengorganisasian dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan siswa Bintara dan masalah yang ditemukan dapat disimpulkan bahwa Proses pengorganisasian dalam pelaksanan Rikkes siswa Bintara memiliki susunan tim diketuai oleh ketua tim yakni Ka SPN, sekretaris tim yaitu Kabinjas, Koordinator tim yaitu Kaklinik, dan tim pemeriksa terdiri dari dokter, perawat dan tenaga umum admnistrasi. Masalah yang terjadi yaitu tenaga kesehatan yang kurang di SPN Polda Sulsel. Solusi yang diambil yaitu dengan meminta bantuan tenaga kesehatan ke Biddokkes Polda Sulsel.

Susunan Tim Rikkes yang jelas dan terstruktur dalam Perkap Nomor 7 Tahun 2016 mencerminkan praktik yang sudah dijalankan dalam internal Polri untuk memastikan kelancaran dan efisiensi pemeriksaan kesehatan calon anggota Polri. Tim Rikkes diharapkan melaksanakan tugasnya dengan menjaga prinsip moral dan profesionalisme, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, guna memastikan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan secara adil dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Keduanya saling melengkapi untuk menjamin bahwa proses penerimaan anggota Polri dilakukan dengan cara yang profesional dan bertanggung jawab. Data lain yang diperoleh adalah bersumber dari hasil telusur dokumen yang terkait dengan pengorganisasian pelaksanaan Rikkes siswa pendidikan Bintara di SPN Polda Sulsel.

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) siswa pendidikan Bintara di SPN Polda Sulsel

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) siswa pendidikan Bintara di SPN Polda Sulsel dengan metode wawancara mendalam, telusur dokumen dan observasi langsung oleh peneliti di SPN Polda Sulsel.

Bagaimana proses pelaksanaan pemeriksaan kesehatan siswa Bintara? Apakah ada masalah yang ditemukan?

"Pelaksanaan dimulai atas dasar surat dari Lemdikpol terkait pelaksanaan Pendidikan di SPN Polda Sulsel, maka dibentuklah Tim Rikkes yang dituangkan dalam surat perintah (Sprint). Rikkes dilaksanakan tiga kali selama pendidikan. Pelaksanaannya sesuai SOP. Kendala yang ditemukan yaitu Pemeriksaan kesehatan hanya sebatas pemeriksaan tensi, BB, TB dan fisik. Spn belum melaksanakan pemeriksaan penunjang Lab, Ekg dan Rontgen karena terkendala Biaya yang belum tersedia untuk memenuhi semua biaya pemeriksaan kesehatan itu." (Tn. J, 55 Tahun, Informan kunci)

Setelah mendapat jawaban secara garis besar dari informan kunci, selanjutnya pertanyaan serupa diajukan ke informan utama dalam hal ini Kepala klinik selaku koordinator Rikkes (Tn. I) yang berperan penting dalam pelaksanaan Rikkes untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail dan terperinci.

"Rikkes siswa dilaksanakan 3 kali selama pendidikan. Rikkes awal, tengah dan akhir pendidikan. Pelaksanaan Rikkes berdasarkan surat perintah Ka SPN Polda Sulsel, waktunya ditentukan dalam kalender pendidikan. Pelaksanaannya yaitu pengisian lembar persetujuan dan biodata siswa, pengukuran BB dan TB, selanjutnya pemeriksaan Tensi dan Nadi. Terakhir pemeriksaan Fisik. Dalam Perkap seharusnya Rikkes siswa disamping pemeriksaan diatas harus melaksanakan pemeriksaan penunjang (Foto thorax dan Lab) serta pemeriksaan tambahan (EKG dan Narkoba). Namun karena terkendala biaya sehingga Pemeriksaan penunjang dan Pemeriksaan tambahan tidak dilaksanakan. Mengingat Rikkes akhir pada saat penerimaan dengan Rikkes awal pendidikan jarak waktunya hanya beberapa hari. Sehingga pemeriksaan akhir sebelum masuk pendidikan masih bisa digunakan. Namun Rikkes tengah dan akhir pemeriksaan Penunjang dan tambahan tidak dilaksanakan karena terkendala biaya Rikkes tidak cukup."

Berdasarkan hasil wawancara mendalam keseluruhan informan mengenai proses pelaksanaan pemeriksaan kesehatan siswa Bintara dan apakah ada masalah yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan kesehatan siswa Bintara dimulai atas dasar surat dari Lemdikpol terkait pelaksanaan pendidikan di SPN Polda Sulsel, maka dibentuklah Tim Rikkes yang dituangkan dalam surat perintah (Sprint). Rikkes dilaksanakan tiga kali selama pendidikan. Pelaksanaannya yaitu pengisian lembar persetuan dan biodata siswa, pengukuran BB dan TB, selanjutnya pemeriksaan Tensi dan Nadi.

Terakhir pemeriksaan Fisik. Dalam Perkap seharusnya Rikkes siswa disamping pemeriksaan diatas harus melaksanakan pemeriksaan penunjang (Foto thorax dan Lab) serta pemeriksaan tambahan (EKG dan Narkoba). Namun karena terkendala biaya sehingga pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan tambahan tidak dilaksanakan. Rikkes akhir pada saat penerimaan dan Rikkes awal pendidikan jarak waktunya hanya beberapa hari. Sehingga hasil pemeriksaan akhir sebelum masuk pendidikan masih dapat digunakan. Namun Rikkes tengah dan akhir pendidikan pemeriksaan Penunjang dan tambahan tidak dilaksanakan karena terkendala biaya pelaksanaan Rikkes yang tidak cukup.

OUTPUT

Kemampuan Tim Rikkes dalam menangani pemeriksaan kesehatan siswa di SPN Polda Sulsel

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis tentang Kemampuan Tim Rikkes dalam menangani pemeriksaan kesehatan siswa di SPN Polda Sulsel. yaitu dengan wawancara mendalam dan telusur dokumen. Dalam Wawancara mendalam terdapat dua pertanyan yang diberikan kepada Informan kunci dan

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Informan Utama dan informan pendukung. Berikut pertanyaan dan kutipan wawancara mendalam dari informan yang ditanya:

Apakah Tim Rikkes membuat daftar nilai hasil Rikkes Siswa Bintara?
"Tim Rikkes akan membuat daftar nilai. Nilai Rikkes siswa digabung dengan nilai Binjas. Yang mengolah nilai akhir Binjaskes adalah Korsis". (Tn. J, 55 Tahun, Informan Kunci)

Setelah mendapat jawaban secara garis besar dari informan Kunci bahwa Tim Rikkes akan membuat daftar nilai Rikkes yang digabung dengan nilai Binjasa.

"Ada daftar nilai yang dibuat oleh Tim Rikkes dan Nilai tersebut sesuai Perkap".(Tn. W, 55 Tahun, Informa Utama)

"Tim Rikkes membuat daftar nilai hasil Rikkes siswa dan akan digabung dengan nilai Binjas". (Tn. K. 56 Tahun, Informan Utama)

Berdasarkan hasil wawancara mendalam keseluruhan informan mengenai apakah Tim Rikkes membuat daftar nilai hasil Rikkes Siswa Bintara dapat disimpulkan bahwa Setelah pelaksanaan Rikkes siswa, Tim Rikkes akan membuat daftar nilai. Hasil Rikkes calon anggota Polri ditentukan berdasarkan pedoman penilaian Stakes. Terdiri dari Stakes 1, 2, 3, 4. Penilaian hasil Rikkes terdiri dari nilai B (70-80), nilai C (60-67), nilai K (55-57). Penilaian ini berpedoman pada Perkap Nomor 7 Tahun 2016.

Penilaian hasil Rikkes bagi calon anggota Polri yang dilakukan dalam bentuk Daftar Nilai mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam Perkap Nomor 7 Tahun 2016 dan menunjukkan adanya evaluasi yang objektif dan terukur terhadap kondisi kesehatan calon. Ini mencerminkan komitmen internal Polri untuk memastikan bahwa seluruh proses pemeriksaan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang baku dan dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan hasil pemeriksaan dengan nilai rujukan yang ada dalam buku pedoman pemeriksaan kesehatan berkala, serta dengan kompetensi pemeriksa yang sesuai.

Hal ini menunjukkan prinsip keadilan, transparansi, dan profesionalisme, di mana setiap calon anggota Polri diperlakukan secara adil, dan proses pemeriksaan serta penilaiannya dilakukan dengan penuh integritas dan akuntabilitas. Dengan pendekatan ini, Polri dapat memberikan layanan yang berkualitas dan terukur serta meminimalkan potensi keluhan atau komplain terkait dengan hasil pemeriksaan kesehatan.

Kualitas Pendidikan dari segi kesehatan siswa pendidikan Bintara

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis tentang Kualitas Pendidikan dari segi kesehatan siswa pendidikan Bintara yaitu dengan wawancara mendalam dan telusur dokumen. Berikut pertanyaan dan kutipan wawancara mendalam dari informan yang ditanya:

Apakah dengan adanya pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) siswa Bintara dapat menurunkan jumlah siswa yang sakit?
"Dengan adanya pelaksanaan Rikkes yang dilaksanakan tiga kali selama pendidikan bisa diketahui tingkat kesehatan siswa Bintara Polri, jika ada yang sakit dapat diketahui secara dini sehingga dapat menekan jumlah siswa yang sakit".(Tn. J, 55 Tahun. Informan Kunci)

"Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan siswa dapat mencegah banyaknya siswa yang sakit. Karena bisa dideteksi cepat".(Tn. W. 55 Tahun. Informan Utama)

"Dengan adanya Rikkes siswa dapat menemukan siswa yang memiliki tingkat kesehatan yang kurang sehingga jumlah siswa yang sakit dapat ditekan".(Ny. D. 39 Tahun. Informan Pendukung)

Berdasarkan hasil wawancara mendalam keseluruhan informan mengenai apakah dengan adanya pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) siswa Bintara dapat menurunkan jumlah siswa yang sakit dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pelaksanaan pemeriksaaan kesehatan (Rikkes) siswa Bintara sangat membantu dalam pendeteksian siswa yang memiliki tingkat kesehatan yang kurang untuk dapat cepat ditangani sehingga dapat mencegah terjadinya siswa sakit parah. Hal ini dapat menekan jumlah siswa yang sakit. Pemeriksaan kesehatan untuk siswa Bintara Polri bertujuan untuk mendeteksi masalah kesehatan lebih dini, yang kemudian dapat mengurangi atau menekan dampak dari penyakit yang dapat mengganggu kesehatan mereka. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan status kesehatan siswa dan memungkinkan mereka untuk mengikuti pendidikan dengan kualitas lebih baik. Dengan memastikan siswa berada dalam kondisi fisik yang optimal, Polri dapat memastikan bahwa pendidikan dan pelatihan berlangsung dengan efektif dan berkualitas.

Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk memberikan manfaat kepada siswa Bintara dengan mengetahui lebih awal masalah kesehatan yang mereka hadapi. Dengan pendekatan ini, Polri menunjukkan tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan untuk mengatasi masalah kesehatan yang ditemukan, sehingga dapat berfungsi dengan baik dalam pendidikan dan kelak dalam tugas mereka sebagai anggota Polri. Pemeriksaan kesehatan yang teratur dan menyeluruh memastikan bahwa calon anggota Polri mendapatkan perhatian yang tepat dan adil terhadap kesehatan mereka, sesuai dengan prinsip profesionalisme dan integritas.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

PEMBAHASAN

INPUT

Man

Tim pemeriksa kesehatan memiliki kompetensi dasar pendidikan kesehatan terutama dokter dan perawat. Penambahan kompetensi kesehatan yaitu dengan meminta secara langsung maupun tidak langsung (tertulis) penambahan personil ke Biro SDM Polda Sulsel dan meminta bantuan petugas kesehatan dari Biddokkes Polda Sulsel. Disamping itu mengikutsertakan mitra klinik untuk membantu jalannya pemeriksaan kesehatan siswa pendidikan Bintara di SPN Polda Sulsel.

Tenaga kesehatan dari personil Polri yang dimiliki SPN Polda Sulsel tidak cukup jika terdapat peningkatan jumlah siswa yang dididik, maka perlu penambahan tenaga kesehatan terutama tenaga dokter dan perawat. Namun masalah terbesar yang ada saat ini yaitu belum terealiasinya permintaan tenaga Kesehatan Personil Polri dari Biro SDM Polda Sulsel sehingga SPN Polda Sulsel perlu meminta tambahan bantuan tenaga kesehatan dari Biddokes Polda Sulsel dan perekrutan mitra dokter dan perawat sementara biaya untuk membayar jasa BKO dan Mitra belum ada pada DIPA SPN Polda Sulsel.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan Syahdilla, dkk (2022) terkait Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang tersebar dengan jumlah dan distribusi yang belum merata. Berdasarkan tinjauan peraturan yang berlaku yakni PMK No.43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, jumlah kebutuhan SDMK pada Puskesmas memiliki selisih jumlah berlebih dan kurang dari standar kebutuhan SDMK pada Puskesmas memiliki selisih jumlah berlebih dan kurang dari standar kebutuhan. Seluruh Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang memiliki kekosongan jenis tenaga tertentu atau dapat dikatakan tidak tersedia.

Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurwazila Amalia, dkk (2024) terkait prinsip manajemen Lean dalam proyek konstruksi di Indonesia, yang bertujuan mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi dengan jumlah pekerja yang terbatas, dimana dalam penelitian tersebut membahas tentang jumlah pekerja di proyek konstruksi yang meskipun lebih sedikit, namun dengan penggunaan prinsip Lean memungkinkan manajer proyek untuk mengoptimalkan waktu dan sumber daya. Dengan perencanaan yang lebih baik dan koordinasi yang efisien, proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran. Penggunaan alat manajemen proyek berbasis digital juga membantu mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual.

Money

Masalah terkait pendanaan untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan siswa pendidikan Bintara yaitu dana yang ada hanya untuk pemeriksaan tertentu saja. Tidak mengcover pemeriksaan kesehatan lengkap sesuai Perkap Nomor 7 Tahun 2016. Masalah teknis yang juga terjadi yaitu adanya keterlambatan pencairan. Kegiatan pemeriksaan kesehatan awal dilaksanakan pada awal masuk pendidikan jadi dana yang digunakan belum diambil dari Dipa karena membutuhkan waktu dalam pencairan anggaran tersebut. Jadi dana yang digunakan dipinjam dari dana operasional SPN Polda Sulsel.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nashriah Akil (2022) yang menyatakan bahwa faktor–faktor penghambat dalam realisasi anggaran belanja modal beberapa satuan kerja dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut terlambatnya penunjukan pengelola anggaran satuan kerja yang berpengaruh pada terlambatnya realisasi satuan kerja tersebut, adanya pergantian pengelola anggaran satuan kerja, dimana pengelola anggaran yang baru harus mempelajari dan memahami semua proses pencairan dana terlebih dahulu. Pada awal tahun, satuan kerja masih belum memiliki petunjuk operasional untuk tahun anggaran berjalan, Ketidaksiapan ini berpengaruh pada jadwal pencairan dana satuan kerja pada tahun anggaran tersebut dan adanya pemblokiran pagu anggaran satuan kerja.

Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dijalankan oleh Muhammad Fahmi (2016), dimana dalam penelitiannya lebih fokus pada hal terkait Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan dalam Meningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kota Palembang, menekankan bahwa Untuk mewujudkan misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, bermoral, berbudaya serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibutuhkan kebijakan dalam prioritas alokasi anggaran pendidikan dimana Alokasi anggaran lebih besar perlu diberikan untuk program pendidikan dasar dengan alokasi anggaran diprioritaskan pada : (1) Peningkatan infrastruktur pendidikan; (2) Peningkatan akses pendidikan; (3) Peningkatan mutu pendidikan.

Berdasarkan penelitian diatas, Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan di lembaga pendidikan kepolisian SPN Polda Sulsel, dapat dijelaskan bahwa pendanaan untuk kegiatan tertentu harus diatur dengan jelas dalam dokumen anggaran dan dikelola oleh unit yang berwenang. Proses pengajuan dan pencairan anggaran harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa dana tersedia pada waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam konteks SPN Polda Sulsel, meskipun dana untuk pemeriksaan kesehatan sudah tersedia, masalah muncul ketika dana yang dialokasikan

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

hanya mencakup pemeriksaan tertentu dan tidak mencakup pemeriksaan lengkap sesuai ketentuan, seperti yang tercantum dalam Perkap Nomor 7 Tahun 2016. Dalam hal ini, meskipun dana untuk pemeriksaan kesehatan sudah direncanakan dan diatur dalam DIPA, adanya keterlambatan dalam proses pencairan menyebabkan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan awal harus dipinjam dari dana operasional sementara waktu.

Faktor-faktor penghambat dalam realisasi anggaran belanja modal, seperti terlambatnya penunjukan pengelola anggaran dan ketidaksiapan dokumen pendukung, dapat berpengaruh pada terlambatnya pencairan dana dan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa proses pencairan anggaran yang efisien dan tepat waktu sangat bergantung pada kesiapan pengelola anggaran dan kelengkapan dokumen administratif yang mendukung.

Pentingnya alokasi anggaran yang lebih besar dan diprioritaskan untuk sektor-sektor penting seperti kesehatan, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks pemeriksaan kesehatan siswa pendidikan Bintara, alokasi anggaran yang memadai untuk mencakup pemeriksaan kesehatan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh regulasi (Perkap Nomor 7 Tahun 2016) akan mendukung tercapainya tujuan kesehatan dan keselamatan peserta didik.

Metode

Berdasarkan hasil wawancara informan mengenai kebijakan khusus di SPN Polda Sulsel yang berkaitan dengan perkap nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) siswa pendidikan Bintara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebijakan khusus terkait Perkap 7 Tahun 2016 di SPN Polda Sulsel yaitu Rikkes siswa dilaksanakan tiga kali selama pendidikan dan jenis pemeriksaan kesehatan siswa menyesuaikan dengan dana kesehatan siswa yang di tetapkan dalam DIPA/anggaran belanja SPN Polda Sulsel.

SPN Polda Sulsel memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan siswa pendidikan Bintara. SOP ini dibuat berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2016. SOP telah dipedomani dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) siswa pendidikan Bintara. SOP Rikkes siswa sudah pernah di sosialisasikan ke seluruh Personil SPN Polda Sulsel. Semua indikator pernah mengikuti dan mendengar tentang SOP tersebut. Kalaupun ada yang kurang tau itu disebabkan karena personil tersebut adalah orang baru di SPN Polda Sulsel.

SOP kerap dipakai untuk menunjukkan kepatuhan terhadap suatu peraturan maupun praktik operasional. Serta guna mendokumentasikan atau mengabadikan bagaimana tugas wajib diselesaikan dalam organisasi kelompok atau individu. SOP menjadi pedoman bagi para pelaksana pekerjaan. Ini bisa berarti para Dosen, Guru, Tenaga Pendidikan, karyawan produksi, resepsionis, office boy, supir, staf administrasi di lembaga pendidikan, staf perpustakaan, supervisor dan manager dll. (Lpm Uin Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ria Haerani Haruna (2024) terkait Implementasi Layanan Pemeriksaan Kesehatan Berkala Oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa upaya untuk menjamin terlaksananya pemeriksaan kesehatan berkala bagi personil Polri secara aman, tertib dan memenuhi kaidah-kaidah kesehatan, maka harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur serta kebutuhan medis penerima layanan kesehatan.

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan oleh Moh Bayu Bagus Sutigar, dkk (2024) mengenai Studi Literature Review IT risk management di Instansi Pemerintahan, dimana dalam penelitian ini membahas mengenai proyek pengembangan sistem informasi di Pemerintah yang menghadapi banyak ketidakpastian dan perubahan selama proses pengembangan, sehingga fleksibilitas dalam pelaksanaan kegiatan menjadi sangat penting. Dalam pelaksanaan proyek IT di pemerintah kota, sering kali tim proyek tidak terikat sepenuhnya pada SOP yang telah ditetapkan di awal. Hal ini karena perubahan kebutuhan pengguna, masalah teknis, dan perkembangan teknologi yang pesat mengharuskan adanya perubahan dan penyesuaian metode kerja.

Material

Berdasarkan hasil wawancara informan mengenai mengenai ketersediaan Sarana dan prasarana dalam membantu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) siswa Bintara di SPN Polda Sulsel dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana sudah tersedia tapi masih kurang dan belum lengkap juga dibutuh sarana dan prasarana yang lebih modern. Jika terjadi peningkatan jumlah siswa Bintara yang melaksanakan pendidikan di SPN Polda Sulsel maka sarana dan prasana yang digunakan untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan siswa pendidikan Bintara perlu penambahan. Solusi dari masalah ini yaitu dengan meminta dukungan dari Biddokkes Polda Sulsel.

Sarana prasarana memiliki arti yang sama dengan fasilitas dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan, sedangkan menurut Subroto di dalam Arianto (2008), fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha dapat berupa benda-benda maupun uang. Lebih luas lagi tentang fasilitas, menurut Arikunto dalam Arianto (2008) berpendapat, fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memudahkan dan memperlancar pelaksanaan segala sesuatu usaha.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Adapun yang dapat memudahkan dan melancarkan usaha ini dapat berupa benda-benda. Jadi dalam hal ini fasilitas dapat disamakan dengan sarana yang ada.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gina Maratus Solihah, dkk (2022) yang menyatakan bahwa Sarana Prasarana dan Kualitas Pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap Kepuasan Pasien. Semakin lengkap sarana prasarana dan semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Nur Hidayah maka akan meningkatkan Kepuasan Pasien.

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Arief Rahmat Bahtiar (2018) dalam penelitiannya terkait analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pelatihan pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (2018). Dimana dalam penelitiannya, faktor sarana prasarana (fasilitas pelatihan) dan kualitas pelayanan (pengajaran dan bimbingan oleh instruktur) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan program pelatihan. Meskipun sarana prasarana dan kualitas pelayanan sudah memadai, hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan program pelatihan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut. Faktor yang lebih dominan adalah motivasi peserta, keterlibatan aktif peserta, dan kemampuan instruktur dalam memberikan materi pelatihan secara efektif.

PROSES

Perencanaan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Siswa Pendidikan Bintara

Berdasarkan wawancara informan, telusur dokumen, dan observasi dalam penelitian ini yaitu proses perencanaan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan siswa pendidikan Bintara bahwa perencanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan siswa tercantum dalam rencana kegiatan (Rengiat) SPN Polda Sulsel didasari atas DIPA (anggaran) dan masuk dalam kurikulum pendidikan. Tidak ada masalah yang berarti dalam proses perencanaan.
Perencanaan atau persiapan Rikkesla diatur dalam Pasal 22 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2013, disebutkan tahap persiapan Rikkesla di tingkat pelaksana, meliputi: menyusun rencana kegiatan, menentukan tempat pemeriksaan, menentukan sasaran Pegawai Negeri pada Polri yang akan diperiksa, menjadwalkan pelaksanaan Rikkesla, menyiapkan administrasi pelaksanaan Rikkesla, mengatur penggunaan anggaran.

Siregar & Ritonga, (2021) dalam penelitiannya menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang didasarkan pada data dan analisis yang akurat. Studi ini menunjukkan bahwa kekurangan dalam perencanaan, seperti estimasi yang tidak tepatatau ketidaksesuaian antara kebutuhan dan alokasi anggaran, dapat menghambat realisasi anggaran dan menyebabkan ketidakefisienan dalam penggunaan dana publik.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Mayang Dewi Anggraini (2022) terkait Implementasi Bantuan Sosial Tunai terhadap masyarakat di masa pandemic Covid-19. Dimana dalam penelitiannya membahas mengenai perencanaan program yang detail telah dilakukan, termasuk penetapan jumlah penerima manfaat, alokasi dana, dan waktu distribusi, perencanaan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diajukan tidak sesuai dengan jumlah BST yang turun atau diterima, tidak ada validasi data, pengambilan susulan bantuan sosial tunai, dan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dikeluarkan Secara Mendadak dan tidak adanya sosialisasi.

Pengorganisasian Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan siswa Pendidikan Bintara di SPN Polda Sulsel

Berdasarkan Perkap Nomor 7 tahun 2016 menyatakan bahwa susunan Tim Rikkes Panitia Pusat terdiri atas Ketua Tim dijabat oleh Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan Polri, Ketua pelaksana Tim dijabat oleh Kepala bidang Kesamaptaan Pusat Kedokteran Kesehatan Polri, sekretaris dijabat oleh Kepala Subbidang Kesehatan Seleksi bidang Kesmapta Pusat Kedokteran Kesehatan Polri. Sedangkan Susunan Tim Rikkes Panitia Daerah/Sub Panitia Daerah, terdiri atas Ketua Tim, dijabat oleh Kepala bidang Kedokteran Kesehatan Kepolisian Daerah, Sekretaris dijabat oleh Kepala Subbidang Kesehatan Kepolisian bidang Kedokteran Kesehatan Kepolisian Daerah, Koordinator Tim Rikkes, dijabat oleh Kepala Urusan Kesmapta bidang Kedokteran Kesehatan Kepolisian Daerah dan Tim Pemeriksa. Menurut Suhendi dan Sasangka (2014) pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan.

Berdasarkan pengertian pengorganisasian maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pengorganisasian merupakan proses penyusunan sturktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Namun hal ini tidak sejalan dengan yang dikemukakan oleh Reza Silvanis (2015) yang dalam penelitiannya tentang Efektivitas Organisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2013, bahwa meskipun pengorganisasian tidak terstruktur dengan sempurna (misalnya, adanya tumpang tindih tanggung jawab), pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai rencana. Hal ini disebabkan oleh adanya sinkronisasi yang baik antara pihak terkait. pengorganisasian yang kurang terstruktur tidak selalu berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan, terutama jika ada faktor pendukung lainnya yang mendukung kelancaran kegiatan. Akan tetapi dalam penelitian ini, pengorganisasian pelaksanaan pemeriksaan kesehatan siswa

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

pendidikan Bintara di SPN Polda Sulsel dilaksanakan sesuai Perkap Nomor 7 Tahun 2016 supaya kegiatan bisa terarah dengan baik.

Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan siswa Pendidikan Bintara di SPN Polda Sulsel

Hasil yang diperoleh dari wawancara informan, observasi dan telusur dokumen yaitu proses pelaksanaan pemeriksaan kesehatan siswa pendidikan Bintara dimulai atas dasar surat dari Lemdikpol terkait pelaksanaan pendidikan di SPN Polda Sulsel, maka dibentuklah Tim Rikkes yang dituangkan dalam surat perintah (Sprint). Rikkes dilaksanakan tiga kali selama pendidikan. Pelaksanaannya yaitu pengisian lembar persetuan dan biodata siswa, pengukuran BB dan TB, selanjutnya pemeriksaan Tensi dan Nadi. Terakhir pemeriksaan Fisik. Dalam Perkap seharusnya Rikkes siswa disamping pemeriksaan diatas harus melaksanakan pemeriksaan penunjang (Foto thorax dan Lab) serta pemeriksaan tambahan (EKG dan Narkoba). Karena terkendala biaya sehingga pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan tambahan tidak dilaksanakan.

Pelaksanaan evaluasi kegiatan Rikkes siswa pendidikan Bintara dilaksanakan tiga kali selama pendidikan oleh Lemdikpol dan Pusdokkes Polri. Bentuk evaluasi yaitu pengiriman laporan kesehatan siswa setiap minggu, kunjungan secara langsung Lemdikpol dan Pusdokkes Polri ke SPN untuk melihat apakah pelaksanaan Rikkes siswa sudah sesuai standar atau belum serta melakukan pengisian kuesioner oleh siswa tentang kesehatan. Tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan Rikkes siswa yaitu dengan melengkapi dan memperbaiki semua temuan yang ada. Kemudian Lemdikpol dan Pusdokkes Polri akan memberikan masukan dan saran serta melengkapi dan mencari jalan keluar dari masalah yang ditemukan.

Kendala dalam pengimplementasian Perkap Nomor 7 Tahun 2016 di SPN Polda Sulsel yaitu Kepatuhan Tim Rikkes dan Siswa, tenaga kesehatan yang kurang, biaya Rikkes belum mengcover Rikkes secara lengkap dan penyesuaian waktu Rikkes dengan Kalender pendidikan jika jumlah siswa meningkat dan tidak sebanding dengan tenaga kesehatan maka akan membutuhkan waktu dalam pelaksanaan Rikkes tersebut. Proses pengawasan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan siswa pendidikan Bintara dilakukan oleh Unit Provost yang memiliki fungsi sebagai penegak kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan SPN Polda Sulsel. Juga diawasi oleh Dokter Mitra diluar Polri. Tidak ada masalah yang berarti dalam proses pengawasan.

Dalam penelitian ini pelaksanaan pemeriksaan kesehatan siswa pendidikan Bintara di SPN Polda Sulsel sudah berpedoman pada Perkap Nomor 7 Tahun 2016 tapi tidak dilaksanakan secara lengkap atau sempurna. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut yaitu Kepatuhan Tim Rikkes dan Siswa terhadap SOP, tenaga kesehatan yang kurang, biaya Rikkes belum mengkafer jenis pemeriksaan secara lengkap dan penyesuaian waktu Rikkes dengan Kalender pendidikan jika jumlah siswa meningkat dan tidak sebanding dengan tenaga kesehatan maka akan membutuhkan waktu dalam pelaksanaan Rikkes tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rafieqah Nalar Rizky (2023) yang menyatakan bahwa dalam implemetasi kebijakan terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan suatu program, salah satunya yaitu SDM, biaya dan kepatuhan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian tentang Pendidikan Dasar pada Daerah Tertinggal (Studi di SDN Inpres Kecil Salena Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Sulawesi Tengah) yang disusun oleh Kuliawati, dkk (2019) dimana faktor seperti SDM, biaya, dan kepatuhan terhadap aturan sering menjadi tantangan, ketiganya tidak selalu menghambat pelaksanaan program. Program pendidikan dasar ini tetap berjalan dengan baik berkat adanya partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun SDM yang terbatas, biaya yang terbatas, dan kepatuhan terhadap aturan yang kadang kurang optimal, faktor-faktor lain seperti kerjasama lintas sektor dan pemanfaatan teknologi dapat membantu memastikan kelancaran program tanpa terlalu terganggu oleh faktor-faktor tersebut.

OUTPUT

Kemampuan Tim Rikkes dalam menangani pemeriksaan kesehatan siswa di SPN Polda Sulsel

Hasil yang diperoleh berdasarkan wawancara informan, telusur dokumen dan observasi dalam penelitian ini yaitu setelah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan siswa pendidikan Bintara Tim Rikkes mampu membuat penilaian. Hasil Rikkes calon anggota Polri ditentukan berdasarkan pedoman penilaian Stakes. Terdiri dari Stakes 1, 2, 3, 4. Penilaian hasil Rikkes terdiri dari nilai B (70-80), nilai C (60-67), nilai K (55-57). Penilaian ini berpedoman pada Perkap Nomor 7 Tahun 2016. Tidak ada masalah dalam penilaian Rikkes siswa. Jika ada siswa yang mendapatkan nilai kurang karena kesehatan terganggu maka siswa akan mendapatkan perawatan diklinik atau di rujuk ke RS. Setelah siswa sembuh akan dilakukan pemeriksaan ulang sampai hasil kesehatan siswa menjadi baik.

Penentuan status kesehatan sangat penting dalam pemeriksaan kesehatan siswa pendidikan Bintara. Hal ini dapat memperlihatkan bagaimana tingkat kesehatan yang dimiliki siswa tersebut. Siswa pendidikan Bintara adalah calon anggota Polri yang nantinya akan bertugas. Personil polri harus memiliki tingkat kesehatan fisik dan mental yang baik. Hal ini sejalan dengan pernyataan (Saputra, 2021) bahwa sejatinya kondisi kesehatan mampu membentuk karakter fisik dan mental personel Polri, namun kenyataan di lapangan masih ditemui kondisi personel

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

tidak sesuai dengan apa yang dikatakan sehat samapta (Dora Kukucska, 2020) sebagai indikator kemampuan personil dalam memberikan kontribusi yang berarti (Susanti et al., 2021).

Namun hal ini tidak sejalan dengan apa yang dikemukakan (Marina Milyavskaya et al., 2015) dalam Journal of Personality and Social Psychology dimana didalamnya tertuang bahwa meskipun olahraga atau kesehatan fisik dapat mendukung kestabilan emosi, faktor- faktor sosial seperti dukungan sosial, perasaan aman, dan pengalaman hidup lebih menentukan kecerdasan emosional, yang berkontribusi langsung pada pembentukan karakter mental.

Namun dalam hal terkait Pendidikan dalam lingkungan polri sesuai Perkap nomor 2 tahun 2002 dan Perkap nomor 7 Tahun 2016, kesehatan fisik yang baik merupakan fondasi penting bagi personel Polri dalam menghadapi berbagai tugas yang menuntut fisik, seperti patroli, pengejaran, atau penanganan kerusuhan. Kondisi fisik yang prima akan memperkuat daya tahan tubuh, kelincahan, dan stamina yang diperlukan dalam menjalankan tugas di lapangan. Personel Polri yang memiliki kondisi fisik yang baik dapat menangani stres fisik dan mental dengan lebih efektif. Misalnya, mereka lebih mampu bekerja dalam kondisi ekstrem atau menghadapi ancaman fisik tanpa mengorbankan kesehatan jangka panjang mereka.

Kualitas Pendidikan dari segi kesehatan siswa Pendidikan Bintara

Hasil yang diperoleh berdasarkan wawancara informan, telusur dokumen dan observasi dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) siswa pendidikan Bintara dapat menurunkan jumlah siswa yang sakit Rikkes siswa pendidikan Bintara juga sangat membantu dalam pendeteksian siswa yang memiliki tingkat kesehatan yang kurang untuk dapat cepat ditangani sehingga dapat mencegah terjadinya siswa sakit parah. Hal ini dapat menekan jumlah siswa yang sakit. Jika pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) siswa pendidikan Bintara tidak berjalan sesuai standar Perkap Nomor 7 Tahun 2016 dan SOP dapat menyebabkan masalah pada kesehatan siswa, kualitas pendidikan akan menurun dan dapat menghasilkan Polisi yang kurang produktif.

Dalam penelitian ini pelaksanaan pemeriksaan kesehatan siswa pendidikan Bintara meskipun dilaksanakan belum sepenuhnya mengacu pada Perkap Nomor 7 tahun 2016 karena ada faktor yang menghambat nya dari intern institusi tetapi pemegang kebijakan tertinggi di SPN Polda Sulsel dalam hal ini Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulsel tetap membuat kebijakan yang dapat meningkatkan status kesehatan siswa sehingga kualitas pendidikan tetap terjaga. Dinyatakan bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program baik jika telah mempedomani 80-100% standar yang ada dalam hal ini Perkap Nomor 7 tahun 2016.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Roro Rukmini Widiastuti (2020) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah H. Damanhuri Barabai berdasarkan Permenkes nomor 129 tahun 2008 baik, karena skor kriteria interpretasi menyatakan bahwa nilai 84,56% termasuk dalam kategori baik. Namun hal ini tidak sejalan dengan yang dikemukakan oleh Michael Fullan (2007) tentang "The New Meaning of Educational Change", dalam penelitian ini, Fullan menyatakan bahwa keberhasilan perubahan pendidikan atau program dalam pendidikan tidak selalu bergantung pada penerapan pedoman standar atau kurikulum yang kaku. Keberhasilan lebih ditentukan oleh bagaimana pendekatan inovatif yang diterapkan oleh pengajar atau sekolah, kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan lokal, dan keterlibatan komunitas. Fullan berargumen bahwa meskipun pedoman standar dan kurikulum nasional bisa menjadi panduan, tetapi implementasi yang fleksibel dan kreatif sering kali lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan siswa. Keberhasilan program dalam pendidikan sering kali tergantung pada sejauh mana pengajaran dapat disesuaikan dengan kondisi spesifik, seperti budaya lokal atau sumber data yang tersedia.

Namun diketahui bersama bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program pendidikan di Polri sangat bergantung pada pedoman standar yang ada sesuai Perkap nomor 7 tahun 2016. Keberhasilan pelaksanaan program pendidikan Polri sangat bergantung pada pedoman standar yang ada. Pedoman ini memberikan arah yang jelas, memastikan keseragaman dan kualitas pendidikan, serta memungkinkan evaluasi yang objektif terhadap hasil pendidikan. Dengan mengikuti pedoman yang terstruktur, Polri dapat memastikan bahwa anggotanya memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme, integritas, dan efisiensi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan kesehatan siswa pendidikan Bintara meskipun dilaksanakan belum sepenuhnya mengacu pada Perkap Nomor 7 tahun 2016 karena ada faktor intern institusi yang menghambatnya, tetapi pemegang kebijakan tertinggi di SPN Polda Sulsel dalam hal ini Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulsel tetap membuat kebijakan khusus yang dapat mempengaruhi status kesehatan siswa sehingga kualitas pendidikan tetap terjaga. Implementasi pemeriksaan kesehatan siswa pendidikan Bintara di SPN Polda Sulsel masih harus diperhatikan aspeknya secara keseluruhan mulai dari input, proses, dan output, sehingga pencapaian kualitas pendidikan dapat ditingkatkan, dan masalah-masalah yang dapat menurunkan status kesehatan siswa dapat diatasi secara keseluruhan.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

DAFTAR PUSTAKA

Arief Rahmat Bahtiar. 2018. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program Pelatihan Pegawai Kantor Pertahan Kabupaten Boyolali. Surakarta.

Fadly Renaldy.M.2019. Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Fasilitas Kesehatan di Kota Bandar Lampung. https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/populika/article/view/759. Diakses pada hari Jumat 29 Agustus 2024.

Hartanto, E. 2023. Implementasi Kebijakan Tes Kesehatan dan jasmani Dalam Proses Rekriutmen Seleksi Bintara Polri Untuk Mengikuti sekolah Inspektur Polisi (SIP) di Polda Jawa Timur.

Heni H. Ngetje, Joorie M Ruru, Novva N Plangiten. Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara.

Ipdulkipli, I. 2020. Pembentukan Bintara polisi Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak (Studi Kasus Sekolah Polisi Negara Polisi Daerah Sulawesi Selatan).Makassar. Universitas Bosowa.

Irfannudin. 2019. Cara Sistematis Berlatih Meneliti. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.

Juliansyah Noor. 2014. Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah , Jakarta : Kencana.

Kuliawati, Radjasa. 2019. Pendidikan Dasar pada Daerah Tertinggal (Studi di SDN Inpres Kecil Salena Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Sulawesi Tengah). Palu. IQRA : Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman. Volume 14. Nomor 01.

Kusumastuti, A. d. 2019. Metode Penelitian Kualitatif.. Semarang. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.

Marina Milyavskaya, Michael Inzlicht, Nora Hope, and Richard Koestner. 2015. Saying “No” to Temptation: Want-to Motivation Improves Self- Regulation by Reducing Temptation Rather Than by Increasing Self-Control. Journal of Personality and Social Psychology. http://dx.doi.org/10.1037/pspp0000045.

Marta, E., & Kresno, S. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bidang Kesehatan. Depok: Raja Grafindo.

Mayang Dewi Anggraini. 2022. Implementasi Bantuan Sosial Tunai Terhadap Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus : Kelurahan Rejowinangun Utara). Tidar.

Michael Fullan. 2007. The New Meaning Of Educational Change. New York and London. Teachers Colleges Press.

Moh Bayu Bagus Sutigar, Vishnu Arya Bhisma, Adrian Noval Firmansyah, Anita Wulansari. 2024. Studi Literature Review IT Risk Management di Instansi Pemerintahan. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika). Vol. 8 No. 1. Surabaya.

Moleong, L. J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad Fahmi. 2016. Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan dalam Meningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kota Palembang.

Nofi Dwi Lestari.2023. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/populika/article/view/759.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2019. Metodologi Penelitian Kesehatan. Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta.

Nurwazila Amalia, Ulfa Nabila, Firah Magfirah Abbas, Wudi Darul Putra. 2024. Penerapan Prinsip Lean Construction Dalam Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Untuk Meningkatkan Produktivitas dan Kualitas. Journal of Comprehensive Science p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584 Vol. 3. No. 5

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian.

Peraturan KapolriNomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan bagi Calon Anggota Polri.

Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi di Indonesia. Yogyakarta. Gaya Media

Rafieqah Nalar Rizky. 2023. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Kota Medan https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentry/article/view/745.

Stang.2014. Cara Praktis Penentuan Uji Statistik dalam Penelitian Kesehatan dan Kedokteran, Jakarta : Mitra Wacana Media.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38778/uu-no-36-tahun2009.

Utomo, W. H. 2005. Hukum Kepolisian di Indonesia. Jakarta. Prestasi Pustaka.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license